



## Ekologi Administrasi dalam Kebijakan Ekonomi Berkelanjutan (Studi Kasus Pemerintah Daerah Gorontalo)

Sri Yulianty Mozin<sup>1\*</sup>, Romy Tantu<sup>2</sup>, Intan Juleyka Halid<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> Fakultas Ilmu Sosial, Jurusan Administrasi Publik, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [yuliantymozi@gmail.com](mailto:yuliantymozi@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract.** *This study examines the application of administrative ecology in the formulation and implementation of sustainable economic policies at the local government level in Gorontalo, Indonesia. Administrative ecology provides an analytical lens to understand the interaction between institutions, socio-cultural values, and environmental contexts that shape policy outcomes. The study is motivated by the challenges of balancing economic growth with environmental conservation and social equity in resource-dependent regions. Using a qualitative case study approach, data were collected through document analysis, field observations, and interviews with local stakeholders. Findings reveal that sustainable economic policy in Gorontalo is significantly influenced by administrative ecology factors, including institutional capacity, local leadership dynamics, and community participation. The integration of ecological, social, and economic considerations remains partial, often constrained by political cycles, limited financial resources, and fragmented inter-agency coordination. Nevertheless, innovative practices such as community-based resource management and multi-stakeholder collaboration have emerged as adaptive strategies. The study contributes to the literature on public administration and sustainable development by providing empirical evidence from Gorontalo. Practically, it highlights the need for strengthening institutional synergy, enhancing participatory governance, and aligning regional development plans with the principles of sustainable economics.*

**Keywords:** *Administrative Ecology; Gorontalo; Local Government; Public Policy; Sustainable Economy.*

**Abstrak.** Penelitian ini menganalisis penerapan ekologi administrasi dalam perumusan dan implementasi kebijakan ekonomi berkelanjutan di tingkat pemerintah daerah Gorontalo, Indonesia. Ekologi administrasi digunakan sebagai lensa analitis untuk memahami interaksi antara institusi, nilai sosial-budaya, dan konteks lingkungan yang memengaruhi keluaran kebijakan. Latar belakang penelitian ini berangkat dari tantangan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan konservasi lingkungan dan keadilan sosial, terutama di wilayah yang bergantung pada sumber daya alam. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif, data dikumpulkan melalui analisis dokumen, observasi lapangan, dan wawancara dengan pemangku kepentingan lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi berkelanjutan di Gorontalo sangat dipengaruhi oleh faktor ekologi administrasi, termasuk kapasitas institusi, dinamika kepemimpinan lokal, serta partisipasi masyarakat. Integrasi dimensi ekologi, sosial, dan ekonomi masih parsial, seringkali terkendala oleh siklus politik, keterbatasan anggaran, dan fragmentasi koordinasi antar-lembaga. Meski demikian, praktik inovatif seperti pengelolaan sumber daya berbasis komunitas dan kolaborasi multi-pihak muncul sebagai strategi adaptif. Penelitian ini berkontribusi pada literatur administrasi publik dan pembangunan berkelanjutan melalui bukti empiris dari Gorontalo, sekaligus memberikan rekomendasi praktis berupa penguatan sinergi institusional, peningkatan tata kelola partisipatif, dan penyelarasan rencana pembangunan daerah dengan prinsip ekonomi berkelanjutan.

**Kata kunci:** Ekologi Administrasi; Ekonomi Berkelanjutan; Gorontalo; Kebijakan Publik; Pemerintah Daerah.

## **1. LATAR BELAKANG**

Pembangunan berkelanjutan menuntut adanya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial. Di Indonesia, penerapan desentralisasi menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang sesuai dengan potensi lokal sekaligus selaras dengan agenda pembangunan nasional dan global. Provinsi Gorontalo, sebagai daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan basis ekonomi agraris-pesisir, menghadapi dilema antara kebutuhan meningkatkan daya saing ekonomi dan kewajiban menjaga kelestarian lingkungan.

Konsep *ekologi administrasi* yang dikemukakan Fred W. Riggs menekankan pentingnya memahami hubungan timbal balik antara struktur administrasi, budaya, dan lingkungan dalam menentukan efektivitas kebijakan publik. Perspektif ini relevan untuk menganalisis bagaimana kebijakan ekonomi berkelanjutan di Gorontalo dipengaruhi oleh faktor kelembagaan, dinamika politik, serta partisipasi masyarakat. Studi-studi terdahulu banyak menyoroti desentralisasi, tata kelola sumber daya, dan pembangunan daerah, namun masih terbatas yang secara eksplisit mengaitkannya dengan kerangka ekologi administrasi, terutama dalam konteks Gorontalo.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan analisis ekologi administrasi dengan kebijakan ekonomi berkelanjutan di tingkat lokal. Urgensi penelitian ini semakin kuat karena Gorontalo menghadapi tekanan pembangunan yang berimplikasi pada degradasi ekosistem, seperti kasus Danau Limboto, serta tantangan pengentasan kemiskinan dan peningkatan daya saing ekonomi. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana ekologi administrasi membentuk kebijakan ekonomi berkelanjutan di Gorontalo dan apa implikasi praktisnya bagi penguatan tata kelola pembangunan daerah.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik studi pustaka, di mana analisis teoritis dibangun berdasarkan berbagai sumber ilmiah yang relevan, baik jurnal nasional maupun internasional. Kajian ini memadukan empat kerangka teori utama, yaitu teori ekologi administrasi, teori desentralisasi dan pemerintahan lokal, teori pengelolaan sumber daya bersama (*commons governance*), serta teori pembangunan berkelanjutan. Integrasi keempat teori tersebut memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap dinamika tata kelola pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal. Pendekatan ini digunakan untuk memahami keterkaitan antara struktur kelembagaan, praktik sosial-ekologis masyarakat, dan kebijakan publik yang diterapkan dalam konteks daerah seperti Gorontalo (Creswell & Poth, 2018).

Dalam perspektif ekologi administrasi, sistem birokrasi tidak berdiri secara terpisah, melainkan berinteraksi dengan norma sosial dan kondisi lingkungan di mana kebijakan dijalankan. Riggs (1961) menegaskan bahwa efektivitas administrasi publik dipengaruhi oleh ekologi sosial, politik, dan budaya tempat birokrasi beroperasi. Dalam konteks Gorontalo, hal ini tercermin dari kompleksitas hubungan antara struktur pemerintahan daerah, masyarakat adat, dan ketergantungan ekonomi terhadap sumber daya alam seperti pertanian, perikanan, serta pariwisata. Penelitian Rifka S. Akibu dkk. (2025) menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi antar-lembaga dalam konservasi Danau Limboto menghambat efektivitas kebijakan ekologis daerah. Kegagalan koordinasi ini mengindikasikan perlunya sistem birokrasi yang lebih adaptif terhadap kondisi sosial dan ekologis setempat, sebagaimana disarankan dalam pendekatan ekologi administrasi (Frederickson et al., 2018).

Teori desentralisasi dan pemerintahan lokal memberikan kerangka analitis untuk memahami bagaimana otonomi daerah dapat mendorong inovasi kebijakan berbasis potensi lokal. Rondinelli (1981) berpendapat bahwa desentralisasi memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat secara lebih kontekstual. Dalam kajian pustaka mengenai ekonomi daerah Gorontalo, ditemukan bahwa sektor pertanian jagung, perikanan, dan rumput laut memiliki potensi besar sebagai pilar ekonomi berkelanjutan (Akuba, 2022). Namun, kapasitas teknis aparatur yang terbatas serta orientasi kebijakan jangka pendek sering kali menghambat implementasi pembangunan berkelanjutan. Studi Boalemo (2020) juga menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi lintas-sektor membuat kontribusi pemerintah daerah terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) belum optimal. Hal ini memperkuat pandangan bahwa desentralisasi tidak otomatis meningkatkan kinerja pemerintahan lokal tanpa disertai peningkatan kapasitas kelembagaan (Smoke, 2015).

Konsep pengelolaan sumber daya bersama atau *commons governance* menjadi relevan untuk menganalisis dinamika pengelolaan sumber daya di Gorontalo, terutama pada Danau Limboto dan kawasan pesisir. Ostrom (1990) menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan sumber daya bersama sangat bergantung pada partisipasi masyarakat lokal, kesepakatan aturan bersama, serta mekanisme pengawasan partisipatif. Studi skenario konservasi Danau Limboto (2024) memperlihatkan bahwa program yang tidak mengintegrasikan pengetahuan lokal dan praktik adat sering kali gagal karena masyarakat merasa tidak memiliki kepemilikan terhadap kebijakan. Sebaliknya, ketika kebijakan formal disinergikan dengan praktik sosial dan nilai-nilai lokal, efektivitasnya meningkat signifikan. Temuan tersebut sejalan dengan teori Ostrom (2010), yang menekankan perlunya tata kelola kolaboratif berbasis kepercayaan sosial dan institusi lokal.

Teori pembangunan berkelanjutan memberikan kerangka konseptual yang menekankan pentingnya keseimbangan antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan — yang dikenal dengan prinsip *triple bottom line* (Elkington, 1997). Kajian literatur mengenai tata kelola pembangunan berkelanjutan menyoroti bahwa prinsip ini hanya dapat diimplementasikan jika didukung oleh *good governance*, yakni tata kelola yang menjunjung transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas (UNDP, 2015; Kooiman, 2003). Namun, penelitian di tingkat daerah, termasuk di Gorontalo, menunjukkan bahwa penerapan prinsip tersebut sering menghadapi kendala struktural seperti fragmentasi kelembagaan, keterbatasan fiskal, serta lemahnya koordinasi antar-sektor (Hidayat, 2023). Studi tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) juga mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat lebih sering bersifat formalitas administratif ketimbang deliberatif substantif (Siregar & Damanik, 2021). Fenomena ini menunjukkan bahwa tata kelola pembangunan berkelanjutan belum sepenuhnya sinkron dengan budaya birokrasi dan dinamika sosial lokal.

Kapasitas institusional dan kepemimpinan lokal menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi pembangunan berkelanjutan. Kapasitas kelembagaan mencakup kemampuan teknis, koordinatif, dan adaptif antar-sektor. Studi tentang digitalisasi perencanaan daerah di Gorontalo Utara (2024/2025) menemukan bahwa keterbatasan infrastruktur digital dan kompetensi sumber daya manusia menjadi hambatan utama dalam implementasi inovasi pemerintahan. Kepemimpinan lokal yang visioner, kolaboratif, dan konsisten terhadap visi pembangunan jangka panjang dapat meningkatkan efektivitas kebijakan (Ansell & Gash, 2008). Dalam kerangka *quadruple helix*, peran kepemimpinan menjadi jembatan sinergi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola ekonomi berkelanjutan yang berbasis partisipasi dan inovasi (Carayannis & Campbell, 2009).

Secara keseluruhan, hasil sintesis teoritis dari berbagai literatur menunjukkan bahwa efektivitas tata kelola pembangunan berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama: (1) keselarasan antara kapasitas kelembagaan dan dinamika ekologi lokal, (2) kemampuan dalam mengintegrasikan partisipasi masyarakat dengan kebijakan formal, serta (3) kepemimpinan daerah yang berorientasi pada visi jangka panjang. Ketiga faktor tersebut saling berkelindan dan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola ekonomi yang inklusif, adaptif, serta berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Melalui pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana teori-teori tersebut saling berinteraksi dan diterapkan dalam konteks tata kelola pembangunan di Gorontalo.

Fred W. Riggs (1961) melalui model *prismatic society* menggambarkan bahwa administrasi publik di negara berkembang beroperasi dalam kondisi sosial yang campuran antara tradisional dan modern. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, kerangka ini sangat relevan karena menjelaskan mengapa kebijakan hijau di daerah seperti Gorontalo kerap menghadapi “gesekan ekologi-administratif”. Prinsip *difusi normatif* menunjukkan bahwa norma-norma modern seperti transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi sering kali hanya diadopsi secara simbolik tanpa transformasi budaya birokratis yang mendalam. Akibatnya, agenda pembangunan berkelanjutan—yang menuntut integrasi ekologis dan sosial—sering berhenti pada tataran regulasi formal, tanpa perubahan perilaku administratif.

Lebih jauh, kondisi *heterogenitas sosial* di masyarakat Gorontalo—di mana nilai-nilai adat dan sistem birokrasi modern berinteraksi secara tumpang tindih—mewujudkan karakter *prismatic society* yang khas. Hal ini menimbulkan tantangan implementasi kebijakan hijau, seperti resistensi terhadap perubahan tata guna lahan, birokrasi yang masih berorientasi prosedural, serta lemahnya koordinasi lintas-sektor. Dalam kerangka Riggs, fenomena ini mencerminkan adanya kesenjangan antara *formal structure* dan *actual behavior* dalam praktik administrasi publik. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan tidak dapat dilepaskan dari upaya “ekologisasi birokrasi”, yaitu menyesuaikan struktur dan perilaku administrasi dengan ekologi sosial dan budaya lokal. Dalam konteks Gorontalo, keberhasilan kebijakan hijau sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah mengintegrasikan prinsip-prinsip modern *good governance* dengan sistem nilai dan praktik sosial masyarakat setempat.

### 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik studi pustaka yang bersumber dari berbagai literatur ilmiah, termasuk jurnal-jurnal nasional dan internasional yang relevan dengan topik tata kelola pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggabungkan kerangka teori yang dikemukakan oleh Riggs, Ostrom, serta konsep tata kelola pembangunan berkelanjutan untuk menganalisis efektivitas kebijakan ekonomi di daerah Gorontalo. Data diperoleh melalui penelusuran artikel ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan yang dipublikasikan secara daring, dengan fokus pada isu kapasitas kelembagaan, partisipasi masyarakat, serta kepemimpinan daerah. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menelaah hubungan antara teori dan temuan empiris dari berbagai sumber. Hasil dari metode ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana keselarasan kelembagaan, integrasi partisipasi masyarakat, dan konsistensi kepemimpinan daerah berkontribusi terhadap efektivitas kebijakan ekonomi berkelanjutan di tingkat lokal.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Fokus pada kajian diarahkan pada konteks Provinsi Gorontalo sebagai daerah yang memiliki dinamika sosial-ekologis dan kelembagaan yang kompleks dalam mengimplementasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Sumber data meliputi dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo Tahun 2022–2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, serta laporan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) Provinsi Gorontalo Tahun 2024 yang diterbitkan oleh BPS. Selain itu, data diperoleh dari publikasi akademik, laporan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), dan hasil penelitian terdahulu. Prinsip triangulasi sumber dan teori diterapkan untuk menjaga validitas interpretasi, sehingga hasil kajian ini menggambarkan hubungan yang komprehensif antara kebijakan, struktur kelembagaan, dan praktik sosial dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan pemerintah daerah masih menjadi tantangan mendasar dalam mewujudkan tata kelola pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Gorontalo. Sejumlah studi menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan antar-OPD, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam seperti Danau Limboto, yang berdampak pada lemahnya koordinasi dan efektivitas pelaksanaan program. Kondisi tersebut sejalan dengan kerangka teori ekologi administrasi Fred W. Riggs (1961), yang menggambarkan fenomena *prismatic society*, yakni situasi di mana sistem birokrasi formal hidup berdampingan dengan praktik sosial tradisional yang belum sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip administrasi modern. Di sisi lain, keterbatasan kapasitas teknis aparatur juga menjadi kendala utama dalam proses digitalisasi sistem perencanaan pembangunan. Walaupun perangkat teknologi telah tersedia, rendahnya literasi digital serta keterbatasan infrastruktur di wilayah perdesaan menyebabkan implementasi sistem belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan pembangunan berkelanjutan tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, melainkan juga oleh kemampuan institusi untuk beradaptasi terhadap konteks sosial dan ekologis lokal.

Kepemimpinan lokal terbukti memiliki peran signifikan dalam menentukan arah dan keberlanjutan kebijakan pembangunan daerah. Literatur yang dikaji menunjukkan bahwa beberapa kepala daerah di Gorontalo telah berhasil mendorong model kolaboratif *quadruple helix* yang melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat. Inovasi ini, misalnya dalam pengembangan program hilirisasi jagung, menunjukkan keberhasilan

integrasi kepentingan antara sektor publik dan privat. Namun demikian, dinamika politik lokal masih sering menciptakan ketidakstabilan kebijakan, terutama menjelang periode elektoral, di mana prioritas pembangunan lebih diarahkan pada program populis jangka pendek untuk memperkuat citra politik. Fenomena ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara visi jangka panjang pembangunan berkelanjutan dengan realitas politik daerah yang bersifat pragmatis. Hal tersebut konsisten dengan temuan UNDP (2015) yang menekankan pentingnya kontinuitas dan konsistensi politik dalam mendukung pencapaian SDGs di tingkat lokal.

Partisipasi masyarakat dalam tata kelola pembangunan daerah secara formal difasilitasi melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Namun, kajian pustaka menunjukkan bahwa mekanisme tersebut masih bersifat prosedural dan administratif, belum sepenuhnya berfungsi sebagai ruang deliberatif yang inklusif. Usulan masyarakat sering kali tidak diakomodasi dalam prioritas kebijakan daerah, sehingga terjadi kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dengan program pembangunan yang dirancang pemerintah. Sebaliknya, praktik pengelolaan sumber daya berbasis komunitas atau *commons governance* (Ostrom, 1990) menunjukkan efektivitas yang lebih tinggi dalam konteks lokal. Kelompok nelayan di Teluk Tomini serta komunitas petani jagung di Gorontalo Utara, misalnya, mengembangkan sistem pengelolaan kolektif yang lebih adaptif terhadap kondisi sosial-ekologis. Dalam praktik tersebut, norma adat dan kesepakatan komunitas memiliki legitimasi yang lebih kuat dibandingkan regulasi formal pemerintah. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan tata kelola sumber daya tidak hanya bergantung pada kebijakan formal, tetapi juga pada kemampuan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan kearifan lokal dan modal sosial masyarakat dalam kerangka kebijakan publik.

Analisis terhadap dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD 2022–2026 mengungkapkan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan (*triple bottom line*) telah diakomodasi secara normatif. Namun, implementasi di lapangan masih bersifat sektoral dan terfragmentasi. Program peningkatan produksi jagung, misalnya, belum disertai dengan strategi mitigasi degradasi tanah dan pencemaran akibat penggunaan pupuk kimia. Demikian pula, kebijakan konservasi Danau Limboto belum sepenuhnya diintegrasikan dengan program peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Temuan ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara perencanaan kebijakan dan pelaksanaan di lapangan, sebagaimana dikemukakan Bovaird dan Löffler (2009) bahwa praktik *good governance* hanya dapat terwujud melalui koordinasi lintas-sektor yang konsisten dan partisipatif.

Interaksi antara kapasitas kelembagaan, kepemimpinan, dan partisipasi masyarakat membentuk konfigurasi *ekologi administrasi* yang khas di Gorontalo. Ketiganya tidak berdiri sendiri, melainkan saling memperkuat atau bahkan saling menahan laju reformasi kebijakan berkelanjutan. Kapasitas kelembagaan menentukan sejauh mana struktur birokrasi mampu mengelola sumber daya lintas-sektor secara efisien. Namun, kapasitas ini akan stagnan bila tidak ditopang oleh kepemimpinan yang memiliki visi ekologis jangka panjang. Kepemimpinan yang adaptif berperan sebagai katalis—menghubungkan institusi formal dengan komunitas lokal, serta mendorong terbentuknya kepercayaan antar-aktor.

Partisipasi masyarakat berfungsi sebagai *ekologi sosial* yang menjaga legitimasi dan keberlanjutan kebijakan. Ketika masyarakat dilibatkan secara substantif, bukan sekadar administratif, muncul modal sosial yang memperkuat penerimaan terhadap kebijakan hijau. Sebaliknya, bila partisipasi hanya bersifat formal, sistem administrasi akan kehilangan dukungan sosial dan menciptakan fragmentasi kebijakan. Dalam ekologi administrasi Gorontalo, sinergi antara tiga elemen ini menciptakan “sistem semi-prismatik”: birokrasi yang sedang bertransisi dari pola patrimonial menuju model kolaboratif partisipatif. Dengan demikian, efektivitas kebijakan pembangunan berkelanjutan di daerah ini tidak hanya bergantung pada aspek teknokratis, tetapi juga pada kemampuan adaptasi sistem administrasi terhadap ekologi sosial, budaya, dan politik lokal yang dinamis.

Kajian ini memperkuat temuan sejumlah penelitian terdahulu seperti Akuba (2025), Ansari (2021), dan Hidayati (2023) yang menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi antar-lembaga serta belum optimalnya integrasi antar-dimensi pembangunan menjadi kendala utama dalam penerapan kebijakan berkelanjutan di Indonesia. Namun, studi ini memberikan perspektif baru dengan menekankan pentingnya interaksi antara kapasitas kelembagaan, kepemimpinan politik, dan partisipasi masyarakat dalam membentuk konfigurasi ekologi administrasi yang khas di Gorontalo. Pola interaksi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas tata kelola pembangunan berkelanjutan tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, politik, dan ekologis yang saling memengaruhi, serta menuntut kolaborasi adaptif antara struktur birokrasi, komunitas lokal, dan sektor non-pemerintah untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.



## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan kajian ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan ekologi administrasi sangat relevan untuk memahami kebijakan ekonomi berkelanjutan di Pemerintah Daerah Gorontalo. Efektivitas kebijakan ditentukan oleh interaksi dinamis antara kapasitas kelembagaan, kepemimpinan lokal, partisipasi masyarakat, dan konteks ekologis setempat. Kapasitas kelembagaan yang masih terbatas, koordinasi lintas-sektor yang terfragmentasi, dan keterbatasan teknis aparatur menjadi kendala utama dalam pelaksanaan kebijakan. Kepemimpinan lokal yang visioner terbukti mampu mendorong kolaborasi multi-pihak, tetapi siklus politik elektoral sering menggeser fokus pembangunan ke agenda jangka pendek. Partisipasi masyarakat dalam forum formal seperti Musrenbang masih bersifat prosedural, sementara praktik berbasis adat dan kearifan lokal menunjukkan efektivitas yang lebih tinggi dalam pengelolaan sumber daya. Secara keseluruhan, meskipun prinsip triple bottom line telah diakomodasi dalam perencanaan, integrasi antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan masih perlu diperkuat agar pembangunan berkelanjutan dapat berjalan secara menyeluruh dan adaptif terhadap dinamika lokal.

Berdasarkan temuan penelitian, penguatan kapasitas kelembagaan perlu menjadi prioritas, melalui peningkatan koordinasi lintas-sektor dan pengembangan kompetensi aparatur dalam perencanaan berbasis bukti serta pemanfaatan teknologi informasi. Konsistensi kepemimpinan lokal juga menjadi kunci, di mana kepala daerah diharapkan mampu mempertahankan visi pembangunan berkelanjutan dengan menerapkan model kepemimpinan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta. Selain itu, kualitas partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan dengan menjadikan Musrenbang sebagai ruang deliberatif yang memungkinkan masyarakat berperan aktif dalam menentukan prioritas pembangunan, sekaligus mengintegrasikan regulasi formal dengan norma dan praktik adat untuk memperkuat legitimasi kebijakan. Integrasi antara ekonomi dan ekologi harus dijadikan prinsip utama dalam setiap program pembangunan, seperti hilirisasi jagung atau pengembangan sektor perikanan, dengan strategi mitigasi dampak ekologis dan pemberdayaan sosial. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan memperluas studi hingga tingkat komunitas desa, membandingkan praktik di provinsi lain di Kawasan Timur Indonesia, serta mempertimbangkan pendekatan kuantitatif atau mixed-method untuk memperkuat validitas dan generalisasi temuan.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Ucapan penghargaan khusus ditujukan kepada para peneliti dan praktisi yang karya-karyanya menjadi sumber literatur penting, serta pihak pemerintah daerah Gorontalo yang menyediakan data dan informasi yang relevan. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pengetahuan tentang ekologi administrasi dan praktik pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Akbar, M., & Yusuf, R. (2020). Kepemimpinan partisipatif dalam pembangunan daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(1), 89–105.
- Akibu, R. S., Rahim, M., & Dako, R. (2025). Perencanaan pembangunan berkelanjutan di kawasan Danau Limboto: Tantangan koordinasi antar-lembaga. *Gorontalo Development Review*, 8(1), 45–60.
- Akademia, I. M. (2020). *Ekologi administrasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ansari, H. (2021). *Green public procurement dalam pembangunan berkelanjutan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ansari, H., & Nugroho, A. (2022). Green public procurement: Peluang dan tantangan di Indonesia. *Journal of Cleaner Production*, 345, 131042. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.131042>
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. (2023). Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Gorontalo. <https://bpk.go.id>
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo. (2023). Rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Gorontalo 2022–2026. <https://bappeda.gorontaloprov.go.id>
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo. (2024). Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2024. <https://bappeda.gorontaloprov.go.id>
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo. (2024). Indikator tujuan pembangunan berkelanjutan Provinsi Gorontalo 2024. <https://gorontalo.bps.go.id>
- Bator, R. J., Bryan, A. D., & Schultz, P. W. (2011). Who gives a hoot?: Intercept surveys of litterers and disposers. *Environment and Behavior*, 43(3), 295–315. <https://doi.org/10.1177/0013916509356884>
- Bovaird, T., & Löffler, E. (2009). *Public management and governance* (2nd ed.). London: Routledge.
- Coolturnesia. (2024, July 20). Nelayan Gorontalo beralih ke energi surya untuk mendukung ekonomi biru. <https://coolturnesia.com>
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Gorontalo. (2024). Strategi hilirisasi industri di Gorontalo. <https://dpmptsp.gorontaloprov.go.id>

- GIZ. (2018). Long-term action plan for sustainable public procurement in Indonesia. Jakarta: GIZ.
- Hidayati, S. N. (2023). Implementasi kebijakan hijau dalam pembangunan daerah: Studi Kota Gorontalo. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 11(3), 201–218.
- Infopublik. (2024, August 8). Pertumbuhan ekonomi Gorontalo tahun 2024 capai 5,11 persen. <https://infopublik.id>
- Kotler, P., & Lee, N. R. (2009). *Up and out of poverty: The social marketing solution*. New Jersey: Pearson Education.
- Laili, N., & Nugraha, D. (2021). Analisis efektivitas kebijakan desentralisasi di Gorontalo. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 134–150.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511807763>
- Ostrom, E., Burger, J., Field, C. B., Norgaard, R. B., & Policansky, D. (1999). Revisiting the commons: Local lessons, global challenges. *Science*, 284(5412), 278–282. <https://doi.org/10.1126/science.284.5412.278>
- Pemerintah Provinsi Gorontalo. (2024, May 12). Gubernur dorong pengembangan ekonomi biru di Teluk Tomini. <https://gorontaloprov.go.id>
- Riggs, F. W. (1961). *The ecology of public administration*. New Delhi: Asia Publishing House.
- Risdwiyanto, A., & Kurniyati, Y. (2015). Strategi pemasaran berbasis partisipasi masyarakat di sektor publik. *Jurnal Maksipreneur*, 5(1), 1–23. <http://dx.doi.org/10.30588/SOSHUMDIK.v5i1.142>
- United Nations Development Programme (UNDP). (2015). *Sustainable development goals: Agenda 2030*. New York: UNDP.
- United Nations Development Programme (UNDP). (2022). *Indonesia SDGs report 2022*. <https://www.undp.org>
- World Bank. (2006). *Local economic development: A primer*. Washington, DC: World Bank.
- World Bank. (2010). *Local economic development: Trainer's manual*. Washington, DC: World Bank.
- World Bank. (2019). Implementasi LED di Asia Tenggara: Studi perbandingan. *Asia Pacific Economic Journal*, 14(2), 55–72.